

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memasuki Milenium baru, pembangunan tidak hanya menyisahkan bagaimana keberhasilan pembangunan dapat berjalan namun juga menyisahkan bagaimana kegagalan dari sebuah pembangunan. Berita-berita tentang kemiskinan, kesenjangan, dan kerusakan ekologis menjadi sebuah indikasi sebuah kegagalan dari pembangunan. Paradigma pembangunan sering kali hanya di ukur dari peningkatan ekonomi tanpa melihat aspek pembangunan yang lainnya, seperti pembangunan kesejahteraan, pembangunan berbasis lingkungan, serta pembangunan yang berkeadilan.

Sustainable Development atau pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah pembangunan alternatif yang dapat di wujudkan dengan melalui keterkaitan yang tepat antara aspek alam, aspek sosio ekonomi, dan kultur. Pentingnya sebuah keterkaitan dalam pembangunan di sadari karena adanya batas-batas pemanfaatan sumber daya alam dan batas kemampuan alam untuk dapat menyerap kegiatan manusia, meskipun melalui penguasaan teknologi batas menjadi bersifat relatif. Karenanya *Sustainable Development* bukanlah situasi yang harmoni yang tetap dan statis, akan tetapi merupakan suatu proses perubahan dimana, eksploitasi sumber daya alam, arah investasi, orientasi perkembangan teknologi, perubahan kelembagaan konsisten dengan kebutuhan pada saat ini dan masa datang. Demikian pula, perkembangan penduduk perlu diperhatikan dalam mencapai keberlanjutan pembangunan, dan karenanya jumlah dan perkembangan penduduk haruslah dalam

keseimbangan dengan perubahan potensi produksi ekosistem (Djajadiningrat,1990 dalam Tjokrowinoto, 2012, hal. 12-13)

Pada tahun 2015 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi mencanangkan agenda pembangunan yang disebut dengan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. SDGs ini merupakan agenda lanjutan dari *Millenium Development Goals* (MDGs). Dengan mengusung tema "Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan", SDGs yang berisi 17 Tujuan dan 169 Target merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan hingga tahun 2030. 17 Tujuan tersebut diantaranya adalah ;

- 1.Tanpa kemiskinan,
- 2.Tanpa kelaparan,
- 3.Kesehatan yang baik dan kesejahteraan,
- 4.Pendidikan yang berkualitas,
5. Kesetaraan gender,
- 6.Air bersih dan sanitasi,
- 7.Energi bersih dan terjangkau,
- 8.Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak,
- 9.Industri,inovasi dan infrastruktur,
- 10.Mengurangi kesenjangan,
- 11.Keberlanjutan kota dan komunitas,
- 12.Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab,

13. Aksi terhadap iklim,

14. Kehidupan dibawah laut,

15. Kehidupan di darat,

16. Institusi peradilan yang kuat dan kedamaian,

17. Kemitraan global untuk mencapai tujuan.

Pengesahan 17 tujuan SDGs menjadi tonggak baru komitmen masyarakat internasional pada agenda pembangunan global untuk meneruskan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. (Ishartono dan Raharjo, 2016 : 163)

Douglas Broderick kepala perwakilan PBB untuk Indonesia mengatakan bahwa 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini penting untuk kualitas hidup manusia dan kelangsungan planet Bumi sendiri. PBB meluncurkan Tujuan ini bersama negara-negara anggota dimana SDGs merupakan indikator penting bermacam aspek kehidupan khususnya kesehatan, pendidikan dan lingkungan hidup. SDGs ini sangat komprehensif dan dengan adanya indikator yang terbagi dalam 169 target, maka para Pemerintah dapat mengevaluasi pencapaiannya sendiri dalam upaya perbaikan taraf kehidupan masyarakat dan lingkungan. Hal ini ditambahkan Adelin Alexandra staf khusus koordinasi SDGs dan informasi PBB, 17 tujuan global pembangunan berkelanjutan bertumpu pada lima fondasi yakni manusia, planet kesejahteraan, perdamaian dan kemitraan.

SDGs juga merupakan inisiatif global yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan manusia menjadi lebih baik dalam aspek sosial dan ekonomi serta dapat bersinergi dengan lingkungan. Pada penyusunannya, disadari penuh bahwa inisiatif global

ini tidak dapat menampilkan adanya implementasi di tingkat regional dan nasional. SDGs di tingkat regional dan nasional pun perlu meneguhkan kembali semangat dan nilai SDGs yang inklusif dan partisipatif sebagaimana yang telah dibangun dalam SDGs tingkat global. Peran negara sangat krusial dalam memastikan bahwa pelaksanaan SDGs berdasarkan pada pendekatan dan strategi yang holistik antara pembangunan ekonomi, inklusi sosial, dan keberlanjutan lingkungan dengan tetap mengedepankan pada karakteristik dan prioritas tiap-tiap negara (Panuluh dan Fitri,2016)

Pembangunan di Indonesia sendiri dilandasi oleh semangat konstitusi dan cita-cita pendiri bangsa, filosofi pembangunan Indonesia tercantum pada UUD 45 baik pada isi ataupun batang tubuh. Pada alenia ke keempat UUD 1945 disebutkan bahwa negara RI bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa (Siahaan,2007 dalam Ermawanto,2010 Hal 4) jika di lihat dari pembukaan UUD 1945 alinea keempat terjadi kontradiktif antara tujuan dan implementasinya, pembangunan diIndonesia masih tertumpu pada pembangunan ekonomi dan pembangunan infrastruktur secara sentralisasi sehingga mendorong ketidakmerataan pembangunan dan muncul kesenjangan satu daerah dengan daerah lainnya. Kesenjangan-kesenjangan inilah yang dapat meningkatkan kemiskikinan, fasilitas pendidikan yang tidak memadai, serta akses kesehatan yang kurang berkualitas.

Permasalahan pembangunan Indonesia juga terletak pada tingginya disparitas (kesenjangan) antarwilayah. Menurut Armida Alisjahbana Hal ini terlihat dari segi kegiatan ekonomi, pembangunan

infrastruktur, sampai tingkat kemiskinan yang begitu timpang. Adanya disparitas tersebut terjadi karena aktivitas ekonomi yang juga timpang. Di kota yang menjadi pusat bisnis, segala sarana dan prasarana tergarap dengan baik. Akan tetapi, di daerah yang bukan pusat bisnis, sarana dan prasarana tidak tergarap. Hal ini kemudian yang membuat aktivitas ekonomi jadi rendah di banyak daerah. Aktivitas ekonomis rendah, tingkat kemiskinan pun menjadi tinggi (Kompas.com:2010)

Pemerintah Indonesia pada era Joko Widodo melalui Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mengimplementasikan *Sustainable Development Goals* dengan mengadopsi hasil kesepakatan *Sustainable Development Goals* melalui prinsip Nawa Cita yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah negara (RPJMN) 2015-2019. Nawa Cita tersebut diantaranya adalah

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya,
3. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya,
4. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik,
5. Membangun Indonesia dari pinggiran,

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing,
7. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan,
8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional, dan
9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. (Soleman dan Noer, 2017: 3)

Nawa cita sendiri merupakan visi Joko Widodo yang merupakan refleksi dari pemikiran Trisakti Presiden Soekarno. Presiden Joko Widodo percaya bahwa konsep Nawa Cita mampu mengatasi berbagai problematika yang dihadapi masyarakat dan dapat menjadi haluan dalam panduan melewati jalan perubahan menuju kesejahteraan. (Kumolo, 2017: 40) Menurut Warsito Raharjo Nawacita sebagai fondasi utama untuk mereformasikan kembali pembangunan Indonesia, karena pembangunan sekarang ini mengacu pada pertumbuhan ekonomi, sehingga menimbulkan disparitas antar wilayah. Sehingga konfigurasi Nawa Cita dan SDGS sangat tepat untuk diimplementasi dalam fondasi pembangunan nasional Indonesia.

Michael Bobby Hoelman, Senior Adviser INFID menyatakan bahwa SDGs penting karena inter-koneksi pembangunan memerlukan tindakan bersama untuk menanggulangi masalah global, yang juga menjadi masalah Indonesia, seperti; kemiskinan, pendidikan, kesehatan ibu dan anak, pelestarian lingkungan, dan lain sebagainya. Agenda SDGs menjadi salah satu panduan atau referensi bagi kerjasama pembangunan global pasca MDGs. Lebih

lanjut Michael menyatakan Indonesia memerlukan penyesuaian terhadap perkembangan pembahasan SDGs dengan RPJMN. Pemerintah perlu memastikan ambisi rencana jangka menengahnya terutama terhadap target dan indikator SDGs. Secara khusus, Indonesia perlu memberikan perhatian lebih besar terhadap tujuan-tujuan yang masih tertinggal sekaligus terhadap orientasi-orientasi strategis tujuan pembangunan global berkelanjutan. SDGs sekarang ini perlu diterjemahkan dan diintegrasikan ke dalam agenda pembangunan nasional dan bahkan daerah. Dalam kasus Indonesia, ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana konvergensi Nawa Cita, RPJMN dan SDGs terjadi dan bagaimana tujuan global yang baru dapat mendukung pembangunan nasional Indonesia

Melihat dari latar belakang masalah yang dipaparkan diatas tadi bahwa pemerintah Indonesia harus segera menyelesaikan permasalahan pembangunannya dengan mengadopsi hasil *Sustainable Development Goals*, dengan diadopsinya hasil *Sustainable Development Goals* harapannya pembangunan tidak menyisahkan lagi kegagalan dari pembangunan namun dapat menjadi keberhasilan dalam sebuah pembangunan. maka pemerintah Indonesia harus mempersiapkan upaya yang efektif agar *Sustainable Development Goals* dapat dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu penulis ingin menganalisis sejauh mana pemerintah Indonesia menerapkan *Sustainable Development Goals* serta bagaimana penerapannya *Sustainable Development Goals* di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang dapat di ambil adalah :
“Bagaimana Upaya Pemerintah Joko Widodo dalam

mengimplementasikan *Sustainable Development Goals* di Indonesia ?”

C. Kerangka Teori

Berdasarkan rumusan masalah yang telah terbentuk, maka untuk menganalisa upaya Pemerintah Indonesia dalam Implementasi *Sustainable Development Goals*, penulis menggunakan 2 konsep , antara lain:

1. Konsep Green Economics

Pada Oktober 2008, UNEP mencetuskan gagasan mengenai “Green Economy” Gagasan “green economy” tersebut bertujuan memberikan peluang yang besar bagaimana upaya memanfaatkan konsepsi “green economy” dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada aspek lingkungan dan ekosistem. Terkait dengan gagasan konsepsi “green economy” tersebut, hal ini terdapat dua hal yang ingin dicapai. Pertama, ekonomi hijau mencoba untuk membuat konsep ekonomi yang bukan hanya sekedar mempertimbangkan masalah makro ekonomi, khususnya investasi di sektor-sektor yang memproduksi produk ramah lingkungan maupun produksi barang dan jasa yang lebih ramah lingkungan (“*green investment*/investasi hijau”), namun juga difokuskan pada bagaimana kontribusi investasi hijau tersebut terhadap produksi barang dan jasa serta dan pertumbuhan lapangan pekerjaan di bidang yang terkait dengan ramah lingkungan (*green job*). Kedua, green economy mencoba untuk menyiapkan panduan pro-poor green investment, atau investasi hijau yang mampu mendorong pengentasan masalah kemiskinan.

Meskipun konsep *Green Economy* masih menjadi perdebatan, beberapa lembaga Internasional sudah mendefinisikan konsep ini. Diantaranya adalah

UNEP (2009) yang mendefinisikan *Green Economy* adalah

“Greening the economy refers to the process of reconfiguring businesses and infrastructure to deliver better returns on natural, human and economic capital investments, while at the same time reducing greenhouse gas emissions, extracting and using less natural resources, creating less waste and reducing social disparities”

Definisi lain tentang *Green Economy* yang didapat adalah ekonomi dari dunia sesungguhnya, dunia dari pekerjaan, kebutuhan manusia, bahan baku dari bumi dan bagaimana semua hal tersebut menjadi satu secara harmonis. *Green Economy* adalah tentang ‘*use value*’ bukan ‘*exchange value*’ tentang kualitas bukan kuantitas, tentang ‘*re generation*’ dari individu. Komunitas dan ekosistem bukan tentang akumulasi dari uang ataupun material (Makmun, 2011) UNEP menyatakan bahwa penerapan *Green Economy* dapat terlihat melalui: 1) peningkatan investasi public dan privat di sektor green, 2) peningkatan dalam kuantitas dan kualitas lapangan kerja disektor green, 3) Peningkatan GDP dari sektor Green, 4) Penurunan penggunaan energi / sumber daya per unit produksi, 5.) Penurunan level CO₂ dan polusi / GDP. 6.) Penurunan konsumsi yang banyak menghasilkan limbah. (Makmun, 2011)

Konsep ekonomi hijau meliputi cakupan yang luas dan merupakan paradigma baru dalam pembangunan ekonomi yang menggantikan kebijakan-kebijakan lingkungan yang pada masa lalu kerap difokuskan pada solusi jangka pendek. Pendekatan ekonomi hijau merupakan win-win solution dalam mengakhiri perdebatan para penentu kebijakan yang tidak ada habis-habisnya seputar "pelestarian lingkungan" dan "pertumbuhan ekonomi". Atau

dengan kata lain, Ekonomi Hijau adalah model pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan terhadap ecological economic dan green economic yang bertujuan untuk menjawab saling ketergantungan antara ekonomi dan ekosistem serta dampak negatif akibat aktivitas ekonomi termasuk perubahan iklim dan pemanasan global. (Wahyudin,: 2016)

Konsep modern Green Economy merupakan konsep yang dikenalkan untuk melengkapi sekaligus mengembangkan konsep Green Economy yang telah ada dengan aspek pembahasan yang lebih membatasi pada ekonomi untuk hal-hal yang bersifat ramah lingkungan (*economy to green requirements*). Konsep modern dalam perspektif ini Green Economy tidak hanya memberi penekanan pada berbagai kebijakan standar, seperti bagaimana menilai lingkungan secara ekonomi dan pemberian sanksi terhadap aktivitasaktivitas yang membahayakan dan berpotensi merusak lingkungan; tetapi yang lebih penting adalah bagaimana konsep ekonomi hijau tersebut mampu mendorong pelaku ekonomi untuk memproduksi barang, perdagangan, dan mengkonsumsi hal-hal yang ramah lingkungan atau produk barang dan jasa yang lebih ramah lingkungan. Pendapatan dan lapangan pekerjaan yang dihasilkan dari Green Economy pada gilirannya diharapkan mampu membuat para 4 pelaku ekonomi menjadi lebih termotivasi untuk melakukan kegiatan yang ramah lingkungan. Perspektif instrumental dari konsep modern ini mengakui bahwa melalui investasi, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, dalam hal inovasi, teknologi, infrastruktur, dan kelembagaan, adalah hal-hal yang dapat mengubah perekonomian atau mencapai perubahan struktur yang fundamental (Bappenas, 2012)

Dengan pengertian tersebut di atas, konsep Green Economy telah mengalami evolusi dari

perpektif lama yang bersifat regulasi untuk “menghijaukan” kegiatan ekonomi “coklat” menjadi konsep baru yang lebih fokus pada pembangunan ekonomi dan pembukaan lapangan pekerjaan (*green jobs*) dengan investasi hijau (*green investment*), produksi, perdagangan, dan konsumsi. Hal tersebut nantinya akan memberikan kontribusi pada peningkatan kesadaran lingkungan dan meningkatnya permintaan pasar untuk produk yang ramah lingkungan serta barang dan jasa yang lebih ramah lingkungan. Adanya potensi permintaan ini mengindikasikan bahwa Green Economy tidak hanya berperan dalam mengatasi masalah-masalah “coklat”, seperti mengurangi emisi karbon, namun juga dapat ditekankan pada isu bagaimana memperoleh penghasilan dan terbukanya lapangan pekerjaan baru. Dengan demikian, Green Economy merupakan suatu alat/sarana yang diharapkan mampu memberikan tiga keluaran, yaitu : 1. adanya sumber-sumber penghasilan serta lapangan pekerjaan yang baru, 2. emisi karbon yang rendah, mengurangi penggunaan sumber daya alam, dan mengurangi peningkatan polusi dan limbah serta 3. memberikan kontribusi untuk tujuan sosial yang lebih luas melalui pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, kesetaraan sosial, dan pengurangan kemiskinan, meskipun tujuan sosial tersebut kadang-kadang tidak terjadi secara otomatis. Namun, tujuan sosial tersebut memerlukan kebijakan kelembagaan yang spesifik dan harus melekat pada kegiatan *green economy* (Bappenas, 2012)

Penerapan *green economy* pada konteks Indonesia melihat banyaknya dampak negatif dari pembangunan . Indonesia menetapkan konsep green economy (ekonomi hijau) dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan. Konsep green economy dilaksanakan untuk mendukung

pembangunan nasional yang bersifat pro-poor, pro-growth, pro-job dan pro-environmental serta juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menyelamatkan lingkungan.

2. Konsep People Centered Development

Seiring dengan berkembangnya pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, maka berkembang pendekatan yang berpusat pada rakyat. Model pembangunan ini merupakan antitesis dari model pembangunan yang berorientasi pada produksi. (Mardikanto,*dkk.*, 2015: 97) Konsep *People Centered Development* pertama kali dikemukakan oleh David C Korten dan Rudy Klause (1984: 1-2) menyatakan bahwa pembangunan haruslah menempatkan rakyat sebagai pusat perhatian dan proses pembangunan harus dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak. Dalam hal ini seperti masalah kemiskinan, kaum minoritas, dan meningkatkan angka kemiskinan serta pengangguran perlu mendapatkan perhatian utama karena dapat menjadikan penyebab ketidak stabilan yang akan membawa pengaruh yang negatif, seperti merenggangnya ikatan-ikatan sosial dan melemahnya nilai-nilai hubungan antar masyarakat. Oleh karena itu, komitmen dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara-cara yang adil, dengan memperhatikan semua aspek merupakan hakikat dari pembangunan yang berpusat pada rakyat.

Strategi pembangunan yang berpusat pada rakyat memiliki tujuan akhir untuk memperbaiki kualitas hidup seluruh rakyat dengan melibatkan rakyat secara langsung baik dengan aspirasi-aspirasi ataupun harapan-harapan masyarakat tersebut. Tujuan objektif dalam strategi pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah memberantas kemiskinan,realisasi

keadilan distributif, dan peningkatan partisipasi masyarakat secara nyata. Seiring dengan berkembangnya pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan Ekonomi maka berkembang pendekatan yang berpusat pada rakyat. Model pembangunan pada rakyat merupakan suatu alternatif baru dalam meningkatkan produksi pembangunan guna memenuhi kebutuhan penduduk, akan tetapi peningkatan itu harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan asas-asas dasar partisipatif dan berkeadilan. (Hikmat Hary,2014)

Korten (1993) menyatakan bahwa pembangunan berpusat rakyat lebih menekankan kepada aspek pemberdayaan masyarakat, yakni memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spritual mereka sebagai tujuan yang lain dicapai dari proses pembangunan. Korten mengemukakan ada 3 tema penting yang dianggap menentukan bagi konsep perencanaan yang berpusat pada rakyat,yaitu :

1. Penekankan akan dukungan dan pembangunan usaha-usaha swadaya masyarakat miskin guna menangani kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri.
2. Kesadaran bahwa walaupun sektor modern merupakan sumber utama bagi pertumbuhan ekonomi yang konvensional,tetapi sektor tradisonal menjadi sumber utama bagi kehidupan sebagian besar rumah tangga yang miskin.
3. Kebutuhan akan kemampuan kelembagaan yang baru dalam usaha membangun kemampuan para penerima bantuan yang miskin demi pengelolaan yang produktif dan swadaya berdasarkan sumber-sumber daya lokal. (Mardikanto, *dkk.*, 2015: 97)

Pembangunan masyarakat juga pada dasarnya adalah dari, oleh, dan untuk seluruh masyarakat, oleh karena itu pelibatan masyarakat seharusnya diajak untuk menentukan visi (wawasan) pembangunan masa depan yang akan diwujudkan. Pembangunan masyarakat dilakukan dengan pendekatan multisektor (holistik), partisipatif, berdasarkan pada semangat kemandirian, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta melaksanakan pemanfaatan sumber daya pembangunan secara serasi, selaras dan sinergis sehingga tercapai secara optimal (Zamhariri, 2008)

Prinsip pembangunan yang partisipatif menegaskan bahwa rakyat harus menjadi pelaku utama dalam pembangunan. Hal ini membutuhkan kajian strategis tentang restrukturisasi sistem sosial pada tingkat, mikro, mezzo dan makro sehingga masyarakat lokal dapat mengembangkan potensi tanpa adanya hambatan pada struktur mezzo dan mikro. Struktur mezzo yang dimaksud dapat berupa struktur pemerintah regional, sedangkan struktur makro dapat berupa struktur pemerintah nasional. (Hikmat Harry:2014)

Kondisi tersebut mencerminkan perlu adanya pergeseran peran pemerintah, dari peran sebagai penyelenggara pelayanan sosial menjadi fasilitator, mediator, kordinator, pendidik, mobilisator, sistem pendukung dan peran-peran lain yang lebih mengarah pada pelayanan tidak langsung. Adapun peran organisasi lokal, organisasi sosial, LSM dan kelompok masyarakat lain yang dipacu sebagai agen pelaksana perubahan dan pelaksanaan pelayanan sosial kepada kelompok rentan atau masyarakat pada umumnya. Dalam posisi sedemikian, maka permasalahan sosial ditangani oleh masyarakat atas fasilitas dari pemerintah.

D. Argumen Penelitian

Berdasarkan Permasalahan di atas dan didukung oleh dasar pemikiran yang telah dikemukakan, maka dalam penelitian ini akan membahas :

Pertama, Pemerintah Indonesia melakukan pembangunan manusia dan pembangunan ekonomi alternatif sebagai prioritas dalam mengimplementasikan SDGs di Indonesia

Kedua, Pergeseran Peran Pemerintah dari penyelenggaraan pelayanan sosial menjadi fasilitator, mediator, kordinator, pendidik, mobilisator dan peran organisasi sosial atau LSM sebagai agen pelaksana perubahan dan pelaksanaan pelayanan sosial

E. Metode Penelitian

1. Metode Analisis

Berdasarkan Pertanyaan yang penulis tuliskan pada bagian sebelumnya maka penelitian ini Penelitian ini bersifat eksplorasi dengan studi literature. Metode yang bersifat eksplorasi deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan suatu fenomena realitas. Metode ini bertujuan untuk menjelaskan Upaya Pemerintah Jokowi Dalam Mendorong Pelaksanaan SDGs di Indonesia.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan (*Library Research*). Dalam penyajian data, penulis menggunakan studi literature dalam pengambilan data dari berbagai sumber seperti buku-buku, laporan riset, koran, situs-situs internet serta sumber-sumber lain

dalam bentuk cetak maupun elektronik yang relevan untuk mendukung penelitian. Berbagai data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang dirumuskan sebelumnya.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui Upaya komitmen Presiden Joko Widodo dalam mendorong pelaksanaan SDGs di Indonesia.
2. Menganalisis Pelaksanaan SDGs di Indonesia.
3. Sebagai bentuk tanggung jawab dalam menyelesaikan Studi strata 1 Hubungan Internasional

G. Jangkauan Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada usaha pemerintah Indonesia era Joko Widodo mengimplementasi Sustainable development goals dan program-program pembangunan di Indonesia pada era reformasi yakni pada tahun 1999-2014.

H. Sistematika Penulisan

BAB I

Bab ini merupakan bab pengantar yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Teori, Fokus Riset dan Sistematika Penulisan

BAB II

Bab ini akan menjelaskan program-program pembangunan di Indonesia

BAB III

Bab ini akan menjelaskan visi Nawa Cita Presiden Joko Widodo dan RPJMD Indonesia tahun 2015-2019.

BAB IV

Bab ini akan menjelaskan dan menganalisa agenda *sustainable development goals* yang tertuang dalam dokumen PBB yang berjudul Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development dan upaya pemerintah Joko Widodo dalam mengimplementasikan SDGs di Indonesia.

BAB V

Bab ini berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya.